

**KAJIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI PROPINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh :

**MEI HUTAJULU
157003007/PWD**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**KAJIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI PROPINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains
dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh :

**MEI HUTAJULU
157003007/PWD**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Judul : **KAJIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : MEI HUTAJULU

Nomor Pokok : 157003007

Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD)

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Erlina, SE. M.Si, Ph.D, Ak.CA
Ketua

Prof.Dr.Ir. Sumono, MS
Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

Prof.Dr.lic.rer.reg.Sirojuzilam, SE

Prof. Dr. Robert Sibarani, MS

Tanggal Lulus : 31 Juli 2017

Telah diuji pada

Tanggal : 19 Juli 2017

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Prof. Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak

Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Sumono, MS
2. Prof. Dr. Badaruddin, MS
3. Dr. Rujiman, SE, MA
4. Dr. Agus Purwoko,S.Hut, M.Si

KAJIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Salah satu agenda penting pemerintah saat ini adalah strategi pengembangan wilayah yang diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan pada kawasan strategis di tiap wilayah. Sekaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa terdapat 226 Daftar Proyek Strategis Nasional di Indonesia salah satunya untuk bidang pariwisata adalah percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya yang berada pada beberapa lokasi di Propinsi Sumatera Utara. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 sebesar 5.181.286,1 juta rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menduduki peringkat ke-4 dari 33 kabupaten/kota lain Indeks Pembangunan Manusia serta penduduk miskin Kabupaten Toba Samosir yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan menempati posisi ke-empat paling sedikit se-Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi wilayah Kabupaten Toba Samosir dan apa yang menjadi sektor unggulan yang dimiliki. Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yang bersifat kualitatif. Objek yang diteliti adalah Kabupaten Toba Samosir sendiri dengan metode penelitian menggunakan Metode Analisis Tipologi Klassen dan Metode Location Question. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Toba Samosir masih belum layak disebut sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara karena jika dilihat dari struktur perekonomiannya, PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toba Samosir masih lebih kecil dibandingkan dengan PDRB dan laju pertumbuhan Propinsi Sumatera Utara. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Toba Samosir dengan nilai LQ 1,40.

Kata kunci : Pusat pertumbuhan, Sektor unggulan, Tipologi Klassen, Location Question

REVIEW DISTRICT TOBA SAMOSIR AS A GROWTH CENTER IN PROVINCE NORTH SUMATRA

ABSTRACT

One of the most important agenda of the current government is the regional development strategy aimed at developing leading sectors in strategic areas in each region. In conjunction with Presidential Regulation No. 3 of 2016 on the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects that there are 226 List of National Strategic Projects in Indonesia one of them for tourism is the acceleration of transportation, electricity and water infrastructure infrastructure for the 10 National Strategic Tourism Area (KSPN) Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung and 7 other areas located in several locations in North Sumatra Province. The amount of Gross Regional Domestic Product of Toba Samosir Regency in 2015 amounted to 5,181,286,1 million rupiah experienced a growth of 4.24 percent compared to the previous year. It is ranked 4th out of 33 other districts / municipalities Human Development Index and poor people of Toba Samosir regency which decrease every year and occupy the fourth position at least in North Sumatera. This study aims to find out how the condition of the region of Toba Samosir and what is the leading sector owned. The type of research conducted is descriptive qualitative. Objects studied is Toba Samosir own with research method using Klassen Typology Analysis Method and Location Question Method. The results showed that Toba Samosir Regency is still not worth mentioning as a growth center in North Sumatera Province because if seen from its economic structure, GDP and Economic Growth Rate of Toba Samosir Regency is still smaller than GRDP and growth rate of North Sumatera Province. Agricultural, forestry and fishery sectors are the leading sectors in Toba Samosir Regency with LQ value of 1.40.

Keywords: Center of growth, Leading sector, Klassen Tipology, Location Questio

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Yesus Kristus Sumber Kekuatan dan Sumber Segala Sesuatu yang telah memberikan kesanggupan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kajian Kabupaten Toba Samosir sebagai Pusat Pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara”** sebagai salah syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Penyusunan tesis ini telah dipenuhi dengan sukacita yang menjadi pelajaran bagi penulis bahwa setiap jika memang ada keinginan dan optimisme yang kuat keberhasilan itu akan kita dapatkan. Banyak tantangan dan dukacita baik secara jasmani dan rohani yang menjadi kenangan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Untuk itu secara khusus penulis berterima kasih kepada **Prof. Erlina, SE, M.Si, P.hD, Ak, CA** dan Bapak **Prof. Ir. Sumono, MS** selaku dosen pembimbing yang membimbing, mengajari, memberikan waktu dan memberikan petunjuk bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, MS, Bapak DR. Rujiman, MA, dan Bapak Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan atas segala ilmu dan pengalaman yang sudah dibagi selama perkuliahan.
4. Seluruh staf pengelola akademik pada program studi terkhusus kepada Bang Yusuf, Kak Indah, Kak Maya yang bersedia membantu kami selama penyelesaian tesis ini.
5. Pejuang- pejuang PWD angkatan 2015 selaku teman dalam berjuang dan saling berbagi. Tidak terasa waktu bersama kalian adalah waktu yang sangat berharga dan sudah menjadi cerita hidup penulis. *Yes we can!!*

6. Pegawai Kantor Camat Porsea 2016 dan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir yang memberikan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Secara khusus Bapak Firman Hutajulu dan Mamak Rapmaida Panjaitan , berkat doa dan perhatiannya penulis bisa menyelesaikan tesis ini serta abang, kakak dan adik tersayang yang memotivasi dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini serta keponakan- keponakan yang menghibur penulis di saat mengalami kejenuhan selama proses penyusunan tesis ini.
8. Buat seseorang yang sudah selalu memotivasi dan memberikan kritikan- kritikan yang bersifat membangun kepada penulis sehingga penulis bisa lebih membuka pikiran untuk menerima setiap perbedaan. Sukses buatmu juga.
9. Kepada semua pihak yang sudah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang sudah penulis rasakan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk menyempurnakan tesis ini sehingga menjadi penelitian yang berguna untuk pengembangan Kabupaten Toba Samosir lebih lanjut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Medan, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Pusat Pertumbuhan.....	7
2.3. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	16
2.4. Perspektif Pengembangan Wilayah.....	22
2.4.1. Pengertian Wilayah	22
2.4.2. Pengembangan Wilayah	25
2.4.3. Daya Tarik Lokasi	30
2.5. Konsep dan Pengertian Sektor Unggulan.....	32
2.6.Kerangka Berpikir.....	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2. Jenis Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	36
3.4. Tennik Pengumpulan Data.....	36
3.5. Jenis dan Sumber Data	37
3.6. Metode Analisa Data	37
3.6.1. Analisis Tipologi Klassen.....	37
3.6.2. Metode <i>Location Question</i> (LQ).....	39
3.6.3. Metode Analisis Geometrik.....	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir	42
4.1.1. Keadaan Geografi	42
4.1.2. Kondisi Topografi	44
4.1.3. Kondisi Demografi	47
4.2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Toba Samosir saat ini	48
4.3. Kondisi Kabupaten Toba Samosir di Propinsi Sumatera Utara	49
4.4. Analisis Komoditas atau Sekktor Unggulan di Kabupaten Toba Samosir	53
4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Toba Samosir Saat ini ...	56

4.6. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kabupaten Toba Samosir	60
---	----

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
3.1	Klasifikasi Daerah Menurut Klassen Typologi	39
4.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Toba Samosir	44
4.2	Rata- rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Toba Samosir	45
4.3	Kondisi kelerengan Lahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015	46
4.4	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Toba Smaosir Tahun 2011-2015	47
4.5	Klasifikasi Kabupaten. Kota di Propinsi Sumatera Utara Menurut Tipology Klassen 2011-2015	50
4.6	Hasil Perhitungan Indeks <i>Location Question (LQ)</i> Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015	54
4.7	Nama Pekan, Lokasi dan Hari Pekan menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015	57
4.8	Ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015	58
4.9	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015	59
4.10	Jumlah Pekan/ Pasar di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015	61
4.11	Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015	63
4.12	Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017	64
4.13	Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015	65
4.14	Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017	65

LAMPIRAN

No	Judul
1	Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah) dalam persen
2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 dalam persen
3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Toba Samosir Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
4	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota Atas Dasar Harga Berlaku Konstan 2010 (persen) Tahun 2011-2015
6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/ Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015
	Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2001
	Surat Ijin Penelitian dari Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian atau analisa pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori yang mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi, analisa keuntungan lokasi dan keterkaitan antar wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih ditingkatkan dan didorong secara maksimal. Teori ini juga menyinkronkan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga sasaran pembangunan lebih dimungkinkan untuk dicapai. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah. Pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Dengan demikian maka daerah yang miskin, tertinggal, kurang maju dan tidak produktif akan menjadi produktif.

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sejalan untuk mencapai pemerataan pembangunan tersebut terciptalah pelaksanaan otonomi daerah per 1 Januari 2001 yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Motif terjadinya tuntutan otonomi daerah karena proses pembangunan di Indonesia pada masa sebelumnya mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa serta

Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang memicu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan wilayah.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Waluyo, 2007). Mengacu pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah mengalami perubahan berkali-kali mulai dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang.

Pemerintah pusat saat ini memberikan pertimbangan bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di daerah dikarenakan potensi sumber daya dan lokasi berada di daerah. Salah satu agenda penting pemerintah saat ini adalah strategi pengembangan wilayah yang diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan pada kawasan strategis di tiap wilayah

dan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Sekaitan dengan hal tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) Daftar Proyek Strategis Nasional di Indonesia, salah satunya untuk bidang pariwisata adalah percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya yang berada pada beberapa lokasi provinsi di Indonesia.

Jika dilihat secara umum, Kabupaten Toba Samosir berada pada $2^{\circ}03'$ - $2^{\circ}40'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}56'$ - $99^{\circ}40'$ Bujur Timur, Kabupaten Toba Samosir memiliki luas wilayah 202.180 Ha. Terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 900 - 2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal.

Besaran PDRB dan ketersediaan jumlah tenaga kerja merupakan Besaran PDRB Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar 5.181.286,1 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 sebesar 4.355.221,01 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen dibanding tahun sebelumnya.

Peringkat pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada Kota Medan dengan IPM sebesar 78,87 pada Tahun 2015. Sementara peringkat terakhir diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 58,25 diantara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir menduduki peringkat ke-4 di antara 33 kabupaten/ kota yang lain setelah Medan, Pematang Siantar dan Binjai.

Penduduk miskin Toba Samosir mengalami penurunan setiap tahunnya dan menempati posisi ke empat paling sedikit se-Sumatera Utara setelah Pakpak Barat, Sibolga dan Samosir pada tahun 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan diamati dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Kabupaten Toba Samosir sudah layak menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara?
- b. Apa yang menjadi komoditas atau sektor unggulan di Kabupaten Toba Samosir?
- c. Apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara,
- b. Mengetahui komoditas atau sektor unggulan di Kabupaten Toba Samosir, dan
- b. Untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung agar Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjadikan Kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu pusat wilayah pertumbuhan, sehingga kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan dapat diketahui.
- b. Memperkenalkan Kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu kabupaten yang layak diperhitungkan sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan studi bagi akademis tentang pusat pertumbuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Saputra (2015) melakukan analisis potensi wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan analisis data model gravitasi dan analisis skalogram untuk mengetahui kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dan mengkaji kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.

Nainggolan (2015) melakukan analisis untuk mengetahui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan melalui analisis klassen tipo logi, metode skalogram dan analisis gravitasi.

Harahap (2009) melakukan analisis Kecamatan Perbaungan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Serdang Begadai dengan menggunakan analisis metode trend untuk mengukur proyeksi jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja beberapa tahun ke depan dan standar pedoman perencanaan lingkungan kota dari Dep.PU.Dir.Cipta Karya untuk menghitung jumlah sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan dan luas lahan yang akan digunakan.

Sasya Danastri dan Hendarto (2009) melakukan analisis pusat-pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon Selatan dengan menggunakan analisis gravitasi, analisis skalogram dan metode *overlay*.

Ermawati (2010) melakukan analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan

analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, analisis Gravitasi/Interaksi, analisis Tipologi Klassen dan analisis *Location Question* (LQ).

2.2 Pusat Pertumbuhan

Ada beberapa faktor yang menjadikan suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan antara lain dilihat dari kondisi fisik wilayah. Kondisi fisik wilayah yang mudah dijangkau akan lebih cepat bertumbuh dibandingkan dengan wilayah dengan kondisi fisik akses tertutup. Pertumbuhan wilayah tersebut memerlukan tenaga, dana dan teknologi yang tinggi.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa untuk mengupayakan pembangunan suatu wilayah. Menurut ahli perencana Francois Perrous (1955) yang memiliki konsep *Growth Poles* bahwa pusat pengembangan didefinisikan sebagai suatu konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling berkaitan melalui hubungan antara input dan output dengan industri utamanya (*propulsive industry*).

Teori pusat pertumbuhan adalah salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus (Allonso, 1986). Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah.

Perkembangan daerah dapat diamati dengan melihat kepada typologinya berdasarkan Analisis Klassen. Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator

utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan penduduk sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi yaitu :

a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)

Daerah- daerah yang termasuk kategori ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi. Alokasi anggaran pemerintah sebaiknya dikurangi secara bertahap karena daerah ini sudah berada pada posisi paling maju dan untuk pembiayaan infrastruktur sebaiknya dialihkan secara bertahap kepada swasta.

b. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)

Daerah- daerah yang termasuk dalam kategori ini secara umum memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi namun pertumbuhan ekonominya relatif rendah. Kebijakan dalam alokasi anggaran pemerintah pusat di wilayah ini sebaiknya hanya komplementer terhadap potensi ekonomi yang ada. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, daerah ini pada dasarnya mempunyai kekuatan besar untuk dapat maju.

c. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)

Daerah- daerah yang termasuk kategori ini secara umum memiliki prospek ekonomi yang baik karena pertumbuhan ekonominya tinggi, walaupun pendapatan per kapitanya masih rendah. Pertumbuhan yang tinggi ini merupakan karakteristik dari yang sedang berkembang. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah menjadikan wilayah ini sebagai prioritas kedua dalam alokasi anggaran. Kegiatan ekonomi akan

bergeser dari wilayah agraris yang mengandalkan hasil pertanian, menuju wilayah industrialis. Ketergantungan terhadap produk- produk primer secara gradual dikurangi dengan cara meningkatkan *value added* dari produk primer tersebut.

d. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Daerah- daerah yang termasuk kategori ini adalah daerah yang secara ekonomi sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita. Dengan kondisi seperti ini akan sulit bagi wilayah- wilayah di kategori ini mengejar ketinggalannya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Karena itu dari segi alokasi anggaran, pemerintah pusat sebaiknya memberikan prioritas dengan cara membangun fasilitas infrastruktur.

Secara matematis tipologi Klassen dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Laju pertumbuhan pendapatan per kapita daerah} = \frac{U_i^1 - U_i^0}{U_i^0}$$

$$\text{Laju pertumbuhan pendapatan per kapita nasional} = \frac{U^1 - U^0}{U^0}$$

$$Y_i = \frac{U_i^1 - U_i^0}{U_i^0} - \frac{U^1 - U^0}{U^0}$$

$$X_i = \frac{U_i}{U}$$

Dimana :

U_i = pendapatan perkapita daerah

U_o = pendapatan perkapita nasional

U_i^0 = pendapatan per kapita daerah i pada tahun t_0

U_i^1 = pendapatan per kapita daerah i pada tahun t_1

U^0 = pendapatan per kapita nasional pada tahun t_0

U^1 = pendapatan per kapita nasional pada tahun t_1

Apabila perkembangan daerah dilihat dari membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maka matriks perkembangan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

<div> <div>PDRB Perkapita (y)</div> <div>Laju Pertumbuhan PDRB (r)</div> </div>	$Y1 > y$	$Y1 < y$
$R1 > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$R1 < r$	Daerah maju tetapi Tertekan	Daerah relatif tertinggal

Tabel 2.2 Matriks Perkembangan Daerah- daerah

Menurut Sirojuzilam (2009) dikemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah sebagai berikut :

a. Transportasi dalam Pembangunan Wilayah

Salah satu permasalahan pokok yang harus dipikirkan dalam perencanaan wilayah menurut Miraza (2006) adalah masalah transportasi. Kamaluddin (2003) menyatakan bahwa transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.

b. Pendidikan dalam Pembangunan Wilayah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usaha ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan dorongan dari semua pihak agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal yang pada akhirnya akan bermanfaat dalam proses pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai produk akhir dari proses pendidikan akan menjadi penggerak dan pelaksana pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu amanat yang tertuang dalam UUD 1945 untuk memberikan pendidikan yang baik bagi semua warga negara wajib dilaksanakan dan mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah.

c. Penduduk dan Pembangunan Wilayah

Jika sumber daya alam adalah merupakan *endowment factors* sebagai suatu anugerah secara alamiah, maka ketimpangan wilayah juga disebabkan oleh Sumber Daya Manusia atau faktor budaya. Pengalaman seperti ini terjadi di Amerika Serikat yang menunjukkan adanya perbedaan budaya diantara wilayah utara dan wilayah selatan. Kerusakan hubungan antara manusia dengan alam mengakibatkan agama dan kreativitas seni semakin maju. Wilayah dengan nuansa agrarisnya yang lebih kental akan menyebabkan terbentuknya perbedaan dengan masyarakat di wilayah yang kegiatan industrinya lebih dominan (Higgins, 1995).

d. Pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Wilayah

Alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan anggaran (Rosen, 2004). Kebijakan ini dikaitkan dengan peranan pemerintah sebagai penyedia dari barang publik.

Dampak eksternalitas dari kebijakan alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut tentunya diharapkan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan bila anggaran yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan.

e. Investasi Domestik (PMDN) dan Investasi Asing (PMA)

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

a. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

c. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah

dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

d. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

e. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

f. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi

ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Laju pertumbuhan pada suatu daerah yang kurang berkembang akan dapat ditingkatkan apabila sebuah pusat pengembangan didirikan pada daerah tersebut sehingga perbedaan kemakmuran antar daerah secara bertahap akan dapat dikurangi. Perbedaan laju pembangunan antar daerah di Propinsi Sumatera Utara menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk membangun sarana dan infrastruktur untuk lebih menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah terbelakang. Hal ini bisa dibuktikan dengan anggaran pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2015 di Propinsi Sumatera Utara bahwa Kabupaten Toba Samosir berada pada urutan 19 (sembilan belas) dengan jumlah anggaran terbesar.
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal kreativitas dan inovasi.
- c. Keterbatasan penguasaan teknologi di wilayah yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakangan itu.
- d. Ketidakterbukaan ekonomi sehingga kurang mampu menghadapi tantangan persaingan.

Dalam rangka pendirian dan pengembangan sebuah pusat pertumbuhan secara baik dan terarah diperlukan beberapa langkah dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Karenanya pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan mulai dari kegiatan yang pertama sampai terakhir. Sjafrizal (2012, hal 152-153) menjelaskan langkah-langkah pendirian pusat pertumbuhan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini perhatian pertama yang perlu diarahkan pada ketersediaan jaringan jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah cakupannya. Di samping itu perlu juga diperhatikan ketersediaan prasarana dan sarana listrik dan jaringan telekomunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini sangat penting agar keberadaan pusat pertumbuhan tersebut nantinya akan dapat menggerakkan pembangunan pada wilayah terkait.

Langkah kedua adalah meneliti potensi ekonomi wilayah terkait komoditas unggulan yang sudah dimiliki atau komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Ditentukan komoditas mana yang dapat diolah pada lokasi pusat pertumbuhan dan produk apa yang dapat dipasarkan ke seluruh wilayah terkait. Analisa ini sangat penting untuk menentukan jenis industri dan kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan pada pusat pertumbuhan.

Langkah ketiga adalah meneliti keterkaitan hubungan input dan output dari masing-masing industri dan kegiatan yang potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Melalui analisis ini akan dapat diketahui jenis dan jumlah kegiatan industri dan kegiatan ekonomi potensial lainnya yang mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Industri dan kegiatan ekonomi tersebut selanjutnya akan

direncanakan sebagai penghuni pusat pertumbuhan tersebut dan diharapkan dapat berkembang dengan pesat dengan memanfaatkan keuntungan eksternal yang dapat diciptakan. Langkah keempat adalah menentukan jenis sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan pusat pertumbuhan tersebut. Langkah kelima yang merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinasikan kompleks industri atau pusat pertumbuhan tersebut. Pembentukan organisasi ini penting supaya pengembangan kompleks industri dapat dilakukan secara terarah dan terpadu. Organisasi pengelola harus dapat merencanakan sistem promosi yang tepat sesuai dengan yang diinginkan para calon investor.

2.3 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sudah pasti mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pembangunan ekonomi. Masalah pokok dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan wilayah masing-masing dengan menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Malizia , 1999).

(Kusreni, 2009) Setiap usaha pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah bergandeng tangan dengan pihak lain (swasta) bersama-sama mengambil inisiatif pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Djojohadikusumo (1994: 1- 9) sebaiknya perlu membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara pengertian juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian satu negara.

Menurut Sen dalam Pressman (2000 : 274), pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan (perkembangan) ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut, sedang pembangunan (perkembangan) ekonomi adalah pengembangan kemampuan manusia yang berupa peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2010: 40-41), pengertian yang sama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terjadi pada awal perkembangan teori pembangunan yang pada dasarnya mengacu pada kondisi di Barat di mana dalam proses awal pembangunannya pada tiga abad yang lalu, tolak ukur itulah yang digunakan. Pembangunan ekonomi pada saat itu hanya diukur secara kuantitatif saja, misalnya dengan GNP per kapita, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, dan inflasi yang rendah. Implementasi teori pembangunan ekonomi memaksa ekonom untuk melakukan revisi strategi pembangunan ekonomi dengan memasukkan faktor pembangunan sosial dan politik.

Ada beberapa teori tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi dan hanya terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terdapat kebebasan perorangan dan kebebasan dalam berorganisasi politik. Terdapat 5 (lima) perkembangan ekonomi, yaitu tahap primitif, tahap beternak, tahap pertanian, tahap pertanian dan industri pengolahan serta tahap pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Friedrich List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang tepat untuk pengembangan industri, sedang daerah tropis tepat untuk pertanian (Arsyad, 2010: 60)
- b. Menurut Rostow, teorinya bermula dari artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (1956) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut Rostow, proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dibedakan dalam 5 (lima) tahap yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Dasar pembedaan proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional (Sukirno, 2006 : 168). Pembangunan ekonomi berarti :

1. Perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri.

2. Proses yang menyebabkan antara lain perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
 3. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
 4. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif.
 5. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi.
- c. Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation* (1776) mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan *output* total adalah sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumber daya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada (Arsyad, 2010: 71-78).

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian, artinya jika sumber daya ini belum digunakan seperlunya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada berperan dalam pertumbuhan *output* . Pertumbuhan *output* tersebut akan terhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan

secara optimal. Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan pasif dalam proses pertumbuhan *output* , artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat *output* . Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan *output* . Jumlah dan tingkat pertumbuhan *output* tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum dari sumber alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat *output* total dapat secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena penambahan modal (sebagai *input*) akan langsung meningkatkan *output*, sedang pengaruh tak langsung adalah meningkatkan produktivitas perkapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja di antara tenaga kerja. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006: 244).

- d. Menurut Evsey D. Domar dan Roy F. Harrod, Harrod telah mengemukakan teorinya pada tahun 1939 dalam jurnal *Economic Journal* sedang Domar mengemukakan teorinya pada tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri , tetapi karena inti teori tersebut sama, maka dikenal sebagai teori Harrod-Domar (Sukirno, 2006: 255). Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu : (a) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh, (b) perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berarti pemerintahan dan perdagangan luar negeri tidak ada, (c) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol, dan , (d) kecenderungan untuk menabung atau *marginal propensity to save* (MPS), rasio modal-output atau *capital-output ratio* (COR), dan rasio pertambahan modal-output atau *incremental capital-output ratio* (ICOR) besarnya tetap (Arsyad, 2010:86).

Model pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Harrod-Domar menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *output* secara positif berhubungan dengan rasio tabungan-pendapatan. Semakin tinggi rasio tabungan- pendapatan dan diinvestasikan, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan *output* dan semakin rendah rasio tabungan- pendapatan dan diinvestasikan, semakin rendah pula tingkat pertumbuhan *output*. Logika ekonomi tersebut sangat sederhana. Jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari *output* totalnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas investasi.

Tambunan (1996) memberi tahapan-tahapan pada pembangunan ekonomi regional yaitu :

- a. Dengan mempelajari terlebih dahulu karakteristik daerah yang akan dibangun, misalnya jumlah jenis serta kondisi-kondisi sumber daya alam yang ada dan keadaan pasar, sosial, ekonomi makro (tingkat pendapatan) dan struktur politiknya.
- b. Menentukan komoditas atau sektor unggulan dan jenis kegiatan ekonomi lain yang perlu dikembangkan, baik yang sudah ada sejak lama maupun yang belum ada.
- c. Menentukan sifat serta mekanisme keterkaitan antar sektor-sektor yang ada di daerah tersebut serta mempelajari kelembagaan sosial masyarakat.

2.4. Perspektif Pengembangan Wilayah

2.4.1 Pengertian Wilayah

Secara umum wilayah dapat diartikan sebagai suatu entitas ruang di muka bumi dengan luasan dan posisi tertentu. Sebuah wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media lokasi berinteraksi (Nugroho, 2004). Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan dapat berarti suatu wilayah yang sempit atau sangat luas, sepanjang di dalamnya terdapat unsur ruang atau *space*. Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi (*partitioning*) atau dikelompokkan (*grouping*) ke dalam suatu kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan lain. Apakah kita membagi atau mengelompokkan tergantung pada titik awal ruang wilayah yang kita maksudkan. Apabila titik awal adalah ruang yang luas dan ingin dianalisis dalam bentuk subbagiannya maka yang kita lakukan adalah membagi wilayah yang luas ke dalam beberapa subwilayah di mana pembagiannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Demikian pula apabila titik awalnya adalah wilayah yang kecil-kecil dan ingin dikelompokkan dalam beberapa kesatuan besar, hal ini dilakukan

mengikuti kriteria yang digunakan. Satuan yang baru itu tetap juga dinamakan wilayah tetapi dengan tambahan ciri/ karakter tertentu sehingga dapat kita bayangkan luasnya lebih kecil atau lebih besar dari luas titik awalnya.

Kata *region* (wilayah) saat ini bahkan digunakan untuk mencakup wilayah beberapa negara sekaligus. Menjadikan wilayah beberapa negara sebagai satu kesatuan haruslah ada dasarnya, misalnya karena ada ikatan seperti kerjasama ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Dalam kerangka analisis ekonomi/ sosial maka wilayah yang dikelompokkan dalam satu *region* bagian-bagiannya haruslah berhubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, perubahan di salah satu bagian/ unit daerah akan berpengaruh terhadap bagian/ unit daerah lainnya. Apabila *region* itu adalah kumpulan wilayah beberapa negara maka di dalam negara harus terjadi perpindahan faktor produksi (tenaga kerja, modal dan teknologi) secara mudah dibandingkan dengan perpindahan ke negara lain. Oleh sebab itu, suatu *region* selalu terdiri dari sekelompok daerah/ negara yang letaknya berdekatan satu sama lain atau bertetangga karena faktor jarak yang sangat mempengaruhi kelancaran dan frekuensi hubungan.

2.4.2 Pengembangan Wilayah

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, meningkatkan, memperbaiki atau memperluas. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis.

Sehingga pengembangan wilayah menurut Sandy (1992) adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Hadjisaroso (1994) pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, atau memajukan dan memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, 1992).

Pengembangan wilayah paling sedikit mempunyai dua makna yaitu : wilayah yang objektif dan wilayah subjektif (Ananta, 1992). Wilayah objektif adalah suatu wilayah yang oleh pada perencana dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan, sedangkan wilayah subjektif adalah perwilayahan yang dibentuk atas dugaan suatu cara mengenal masalah. Hal ini dilakukan untuk melakukan klasifikasi, yang selanjutnya wilayah subjektif dibagi menjadi dua jenis yaitu : (1) wilayah homogen, yang mempunyai karakteristik yang sama secara fisik dan sosial ekonomi, (2) wilayah fungsional, yaitu wilayah yang dibentuk berdasarkan atas adanya hubungan fungsional antara unsur-unsur tertentu yang ada pada wilayah tersebut.

Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan harus dilaukan secara terpadu dan saling memperkuat yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Upaya diletakkan pada peningkatan keserasian dan keseimbangan pembangunan antara keduanya melalui peningkatan peran serta, pengembangan prakarsa, dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan serta ketersediaan prasarana dan sarananya. Keterkaitan antarwilayah kota dan desa perlu dikembangkan agar memberi manfaat bagi keduanya. Wilayah perkotaan merupakan pasar bagi pemasaran produk-produk dari daerah

pedesaan, sebaliknya wilayah pedesaan memerlukan pelayanan prasarana dan sarana dari perkotaan. Wilayah perkotaan merupakan sumber modal, informasi, pengetahuan, dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkat produktivitas di wilayah pedesaan. Meningkatnya kualitas hidup di perkotaan harus mampu ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.

Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan globalisasi yang semakin menguat, pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan diupayakan agar dapat lebih tangguh dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi, perubahan tuntutan masyarakat, berkembangnya industri-industri jasa, makin tingginya mobilitas tenaga kerja antar negara, munculnya kutub-kutub pertumbuhan regional baru, dan kecenderungan meningkatnya urbanisasi di kota-kota di sekitar kota besar. Wilayah perkotaan akan semakin penting peranannya baik sebagai simpul kegiatan pelayanan dan pusat kegiatan produksi dan distribusi, pusat industri, pusat jasa dan keuangan, serta pusat pelayanan umum maupun sebagai pusat inovasi dan kemajuan sosial budaya. Perkembangan perkotaan dan pedesaan tidak terlepas dari perkembangan dunia, dan akan mendapat pengaruh dari perubahan dinamis dalam lingkup global. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dititikberatkan pada pemantapan sistem kota-kota dan desa-desa agar lebih kuat dalam menghadapi perubahan dinamis tersebut, dan diselenggarakan dalam suatu sistem tata ruang yang mantap.

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di wilayah perkotaan menyebabkan lebih meningkat pula kebutuhan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, pasar, air bersih, drainase, dan pengendalian banjir, sarana persampahan, pengolahan air limbah. Oleh karena itu, pengembangan

wilayah dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan untuk makin terpadu dan terencana dan ditingkatkan kemampuannya dalam melayani daerah di sekitarnya. Seiring dengan peningkatan pembangunan, maka kebijaksanaan pembangunan wilayah perkotaan yaitu mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengembangan wilayah kota-kota baru maupun dalam pemanfaatan lahan-lahan kota yang telah berkembang lebih efisien, pembangunan sarana dan prasarana transportasi , penyediaan perumahan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan dan penyediaan lahan. Pehatian yang lebih besar diberikan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan kumuh perkotaan melalui program perbaikan perumahan dan permukiman.

Mengingat corak permasalahan yang kompleks, pengembangan wilayah perkotaan menurut tingkat koordinasi yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan. Oleh karena itu, kemampuan organisasi pengelolaan kota diupayakan untuk ditingkatkan secara terus menerus. Dalam pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana dasar pembentuk lingkungan hunian yang memadai masih merupakan masalah yang menonjol, terutama bagi lingkungan hunian penduduk berpenghasilan rendah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004) mengamanahkan, bahwa pembangunan perkotaan diagendakan untuk saling mengait dengan wilayah pedesaan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang mengarah pada:

- a. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- b. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan terutama di luar pulau Jawa.
- d. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis, dalam artian hasil produksi wilayah pedesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

Terdapat langkah-langkah atau kebijakan yang perlu ditempuh seorang kepala daerah/ perencana pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya, yang secara umum berarti meningkatkan perekonomian daerah tersebut antara lain :

- a. Sejalan dengan teori basis ekspor, perlu didorong pertumbuhan dari sektor-sektor yang hasil produksinya dapat di jual ke luar daerah atau mendatangkan yang dari luar daerah, terutama ekspor ke luar negeri. Sebetulnya usaha untuk menjual suatu produk ke luar daerah tidak mudah. Apabila daerah lain juga menghasilkan produk yang sama, daerah itu harus mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau minimal sama tetapi harga pokok lebih rendah (efisien).

- b. Sejalan dengan teori Harrod-Domar, harus diperhatikan produk-produk yang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sebaiknya produk ini juga diusahakan agar bisa diekspor, misalnya dengan peningkatan mutu, perbaikan jalur pemasaran, atau penyediaan volume dalam jumlah ekonomis untuk dipasarkan ke luar daerah. Akan tetapi, apabila usaha untuk menembus pasar ekspor masih belum memungkinkan, peningkatan produksi untuk komoditi itu tidak perlu didorong melebihi kebutuhan lokal karena akan menurunkan harga dan merugikan produsen.
- c. Sejalan dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik, harus diusahakan prasarana dan sarana perhubungan yang baik dan lancar, mempermudah arus keluar masuk orang dan barang, serta perbaikan arus komunikasi dan penyebarluasan informasi.
- d. Sejalan dengan model interregional perlu diusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah kita. Hal ini dapat ditempuh dengan menawarkan program-program yang bisa dibiayai atau menarik untuk dibiayai.
- e. Daerah tetangga yang berkembang tidak perlu dicemburui, tetapi sebaiknya didorong dan dimanfaatkan dengan melihat berbagai kemungkinan untuk menambah ekspor barang atau jasa dari daerah kita ke daerah tersebut.
- f. Masyarakat didorong untuk mengonsumsi produk lokal dan industri didorong untuk lebih banyak memakai komponen lokal (tetapi dengan tidak mengorbankan mutu agar mudah memasuki pasar ekspor).
- g. Dari rumus multiplier, diketahui bahwa tingkat pajakan mempengaruhi besarnya *multiplier regional*. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan

multiplier regional. Akan tetapi, di lain sisi diketahui bahwa pajak pada akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah dan makin besar pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan regional.

Terdapat beberapa faktor penyebab suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan antara lain :

a. Kondisi fisik wilayah

Kondisi fisik wilayah merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan, misalnya kondisi fisik yang datar akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi wilayah yang berbukit-bukit atau lembah yang curam. Perkembangan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan itu memerlukan dana, tenaga, bahkan teknologi yang tinggi dan pada akhirnya harus dipandang dari sudut ekonomisnya.

b. Kekayaan sumber daya alam

Suatu wilayah yang memiliki sumber daya melimpah dapat menjadi pusat pertumbuhan. Pemusatan itu akan diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti rumah, pasar, terminal, industri, sekolah, dan lain sebagainya. Akibatnya akan terjadi pemekaran wilayah ke segala arah.

c. Sarana dan prasarana transportasi

Sarana dan prasarana transportasi memegang peranan penting dalam mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Suatu titik lokasi yang berada pada wilayah dengan jaringan transportasi yang baik, besar kemungkinan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan akan memacu aktivitas ekonomi daerah bersangkutan.

d. Adanya industri

Perkembangan industri pada suatu wilayah mengakibatkan munculnya lapangan kerja. Keberadaan industri pada suatu wilayah itu dapat memberikan berbagai peluang aktivitas ekonomi dan selanjutnya menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya.

e. Kondisi sosial dan budaya masyarakat

Kondisi sosial budaya suatu masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan bagi wilayah yang ada di sekitarnya. Misalnya suatu kehidupan masyarakat yang telah modern lebih bersifat terbuka untuk menerima pembaharuan-pembaharuan dan dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Sedangkan pada kehidupan masyarakat tradisional sangat sulit untuk menerima pembaharuan-pembaharuan yang ada di sekitar wilayahnya.

2.4.3 Daya Tarik Lokasi

Daya tarik suatu lokasi sangat penting karena wilayah membutuhkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya sehingga mereka dapat memiliki pendapatan yang memadai untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik lokasi tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah sebagai manajer pengelola pembangunan. Semua pemangku kepentingan di dalam suatu daerah seperti pengusaha dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap pembangunan di wilayahnya sehingga hendaknya mereka juga ikut mempertahankan dan meningkatkan daya tarik lokasi supaya para pemilik modal melakukan investasi di wilayahnya.

Besaran PDRB dan jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan keperluan analisis ekonomi wilayah karena dua hal tersebut merupakan faktor- faktor utama yang membentuk dan menentukan kinerja perekonomian suatu wilayah. Semakin besar PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin besar kuantitas transaksi ekonomi yang berlangsung di suatu wilayah yang bersangkutan sedangkan semakin besar jumlah tenaga kerja yang tersedia maka itu akan menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Namun daya tarik suatu lokasi tidak semata- mata tergantung pada besaran PDRB dan ketersediaan jumlah tenaga kerja, terkhususnya kepada daerah yang sedang berkembang yang PDRB daerahnya pada umumnya masih rendah. Daerah tersebut harus mempunyai strategi untuk memaksimalkan faktor- faktor produksi lainnya seperti penawaran sumber daya lokal yang berlimpah dan peningkatan produksi khas daerah lokal.

Selain faktor- faktor yang sudah disebutkan di atas, upaya untuk meningkatkan daya tarik lokasi juga tergantung pada ketersediaan prasarana fisik. Sebagai contoh ketersediaan prasarana transportasi yang sangat menentukan aksesibilitas dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transport. Selain dukungan sarana dan prasarana fisik, kegiatan usaha juga sangat peka terhadap dukungan iklim usaha yang kondusif. Stabilitas sosial dan politik, jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha, prosedur perijinan yang kelas dan peraturan fiskal yang rasional merupakan beberapa contoh dari kondisi iklim usaha yang diharapkan oleh para investor.

2.5. Konsep dan Pengertian Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional, maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan Negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat di kategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Menurut Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitiv advantage*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat di tentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

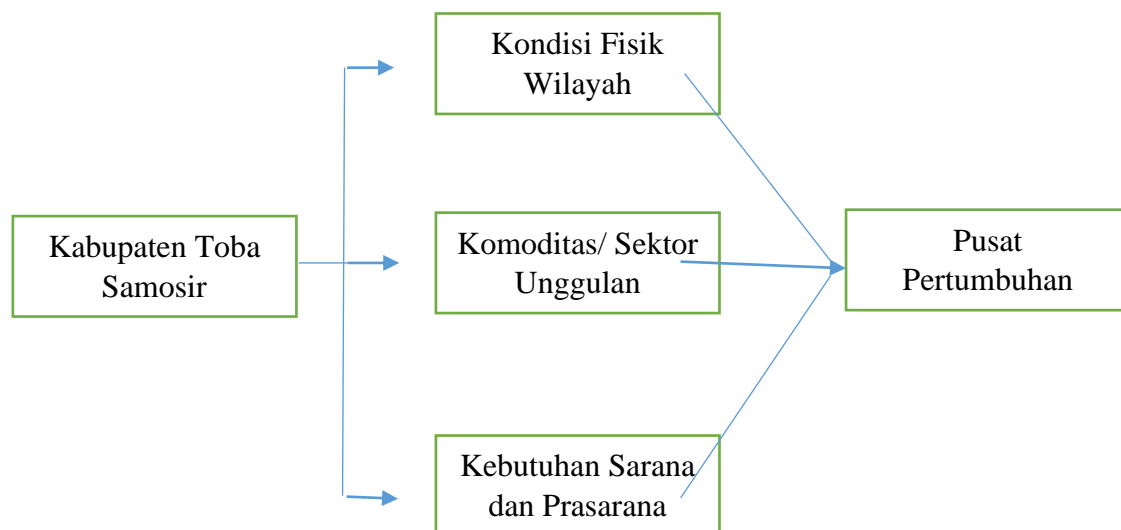
2.6. Kerangka Berpikir

Kabupaten Toba Samosir sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu daerah yang memiliki kekhasan sumber daya yang apabila serius penanganannya akan dapat memberikan peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Toba Samosir. Pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta harus dapat menjalankan peran dan fungsinya sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut lebih optimal. Dukungan pemerintah pusat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan pada kawasan strategis di tiap wilayah dan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan kesempatan yang tidak boleh disia- siakan Toba Samosir sebagai peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan harus dilakukan secara terpadu dan saling memperkuat yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Upaya diletakkan pada peningkatan keserasian dan keseimbangan pembangunan antara keduanya melalui peningkatan peran serta, pengembangan prakarsa, dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan serta ketersediaan prasarana dan sarannya.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas peneliti mengkaji tiga faktor yaitu bagaimana kondisi fisik wilayah Toba Samosir, apa yang menjadi sektor unggulan Toba Samosir dan berapa banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti jumlah sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lainnya.

Kajian yang diperoleh diharapkan nantinya akan memberikan gambaran apakah Toba Samosir sudah dapat dijadikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera.



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, menganalisis, dan mempelajari serta pada akhirnya menyimpulkan data- data mengenai kondisi fisik wilayah, komoditas/ sektor unggulan yang ada di Kabupaten Toba Samosir dan kebutuhan sarana dan prasarana apa yang diperlukan Kabupaten Toba Samosir sehingga menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juni 2017.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang akan dibatasi pada ruang lingkup analisis yang di arahkan kepada identifikasi wilayah dan potensi pertumbuhan serta identifikasi kebutuhan pada wilayah tersebut. Maka kondisi dan aspek sosial ekonomi dan fisik akan di analisis berdasarkan indikator wilayah seperti jumlah penduduk, pendapatan pada wilayah pusat pertumbuhan. Banyaknya fasilitas pelayanan umum tiap wilayah pusat pertumbuhan seperti sarana pendidikan, kesehatan. Analisis dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ini mengungkapkan suatu masalah pusat pertumbuhan, menjelaskan bagaimana kondisi wilayah Kabupaten Toba Samosir sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder antara lain PDRB Kabupaten Toba Samosir dan Propinsi Sumatera Utara dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder antara lain PDRB Kabupaten Toba Samosir dan Propinsi Sumatera Utara periode 2012-2015 dan data sekunder lainnya seperti data jumlah penduduk, tingkat pendapatan penduduk serta jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Toba Samosir yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

3.3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan populasi yaitu Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan.

3.4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara bebas. Peneliti bebas menanyakan apa saja tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan dan diperlukan. Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman tentang apa yang akan ditanyakan sehingga yang diwawancarai tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah Pegawai Kelurahan di Kecamatan, Pegawai Kecamatan, Pegawai Bappeda Kabupaten Toba Samosir, Pegawai BPS Kabupaten Toba Samosir.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Diperoleh dari hasil wawancara bebas dengan beberapa Pegawai Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Toba Samosir serta pihak- pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari dokumen yang berasal dari instansi yang terkait yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data dari Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Bappeda, Kantor BPS Kabupaten Toba Samosir serta kantor/dinas/instansi lain yang masih terkait dalam penelitian ini.

3.6. Metode Analisa Data

3.6.1 Analisis Tipologi Klassen

Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah merupakan analisis yang cukup penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi akan dapat terlihat bagaimana potensi relatif perekonomiannya suatu daerah baik secara agregat dan sektoral terhadap daerah lain sekitarnya. Untuk mengetahui gambaran tentang klasifikasi tiap Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Utara digunakan *klassen typology* sebagai dasar analisis. Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di suatu daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Menurut

Sjafrizal (2008) melalui alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yaitu:

1. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan ataupun kabupaten/kota.
2. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan ataupun kabupaten/kota.
3. Kuadran III yaitu sektor sedang tumbuh (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan ataupun kabupaten/kota.
4. Kuadran IV yaitu sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan ataupun kabupaten/kota.

<div style="text-align: center;"> PDRB Perkapita (y) Laju Pertumbuhan PDRB (r) </div>	$Y1 > y$	$Y1 < y$
	$R1 > r$	$R1 < r$
$R1 > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang Cepat
$R1 < r$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif Tertinggal

Tabel 3.1 Klasifikasi Daerah Menurut *Klassen Typology*

Keterangan:

- R1 : laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tiap kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara
- r : rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Propinsi Sumatera Utara
- Y : pendapatan per kapita tiap kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara
- y : rata-rata pendapatan per kapita Propinsi Sumatera Utara.

3.6.2 Metode *Location Question* (LQ)

Location Question adalah salah satu tehnik untuk menghitung kapasitas ekspor suatu perekonomian dan juga untuk mengetahui derajat kemandirian suatu sektor di perekonomian wilayah tersebut. Metode analisis LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian yang mengarah kepada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Nilai LQ sering digunakan untuk penentuan sektor unggulan yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/ industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/ industri tersebut secara nasional.

Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$x = \frac{\frac{x_i}{\text{PDRB}}}{\frac{X_i}{\text{PNB}}}$$

di mana : x_i = Nilai tambah sektor i di suatu daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Brutto daerah tersebut

X_i = Nilai tambah sektor i secara nasional

PNB = Produk Nasional Bruto atau GNP

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan antara wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan Propinsi Sumatera Utara, maka propinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Toba Samosir itu sendiri.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor tersebut di daerah dimaksud lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut.

3.6.3 Metode Analisa Geometrik

Adapun jenis sarana dan prasarana yang akan diteliti adalah sarana niaga, sarana niaga, sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut dianalisa berdasarkan atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum Tahun 2001, dengan standar sebagai berikut:

a. Sarana Niaga

Jumlah sarana niaga dalam hal ini pasar minimal tersedia 1 unit untuk 30.000 jiwa penduduk

b. Sarana Pendidikan

1. 1 unit TK untuk setiap 1.000 penduduk
2. 1 unit SD untuk setiap 6.000 penduduk

3. 1 unit SLTP untuk setiap 25.000 penduduk
4. 1 unit SLTA untuk setiap 30.000 penduduk
5. Minimal sama dengan kota sedang/kecil, juga tersedia 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 penduduk

c. Sarana Kesehatan

1. 1 unit Balai Pengobatan untuk setiap 3.000 jiwa
2. 1 Unit BKIA/RS Bersalin untuk setiap 10.000-30.000 jiwa
3. 1 unit Puskesmas untuk setiap 120.000 jiwa
4. 1 unit Rumah Sakit untuk setiap 240.000 jiwa

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir

4.1.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Peresmian pemekaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1999. Pada saat dibentuk Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan dan pada tahun 2002, 4 (empat) perwakilan kecamatan ditetapkan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002, yaitu: Kecamatan Ajibata, Pintu Pohan Meranti, Uluan dan Ronggur Nihuta. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2002 Kecamatan Borbor juga dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002.

Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Dan setelah dimekarkan Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 10 kecamatan. Pada Tahun 2005 Kecamatan Sigumpar dibentuk dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen dengan Perda Nomor 6 Tahun 2005. Tahun 2006 terbentuk lagi 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Tampahan, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Siantar Narumonda berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006. Tahun 2008 Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian terbentuk dengan perda Nomor 5 Tahun 2008,

sehingga sampai saat ini Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 16 Kecamatan yang terdiri dari 231 desa dan 13 Kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Toba Samosir berada pada $2^{\circ}03'$ - $2^{\circ}40'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}56'$ - $99^{\circ}40'$ Bujur Timur, Kabupaten Toba Samosir memiliki luas wilayah 202.180 Ha. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Toba Samosir berada di antara lima kabupaten yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Labuhan Batu dan Asahan,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara serta,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Silaen, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Uluan, Kecamatan Ajibata, dan Kecamatan Bonatua Lunasi dengan luas wilayah masing – masing dan jarak tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Toba Samosir

	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas/ Area (km²)	Jarak (km)
01	Balige	Balige	91,05	0
02	Tampahan	Gurgur	24,45	10
03	Laguboti	Laguboti	73,90	7
04	Habinsaran	Parsoburan	408,70	52
05	Borbor	Borbor	176,65	58
06	Nassau	Lumban Rau Tengah	335,50	76
07	Silaen	Silaen	172,58	15
08	Sigumpar	Sigumpar	25,20	11
09	Porsea	Porsea	37,88	19
10	Pintu Pohan Meranti	Pintu Pohan	277,27	39
11	Siantar Narumonda	Narumonda I	22,20	16
12	Parmaksian	Pangombusan	45,98	23
13	Lumban Julu	Lumban Julu	90,90	40
14	Uluan	Lumban Binanga	109,00	24
15	Ajibata	Pardamean Ajibata	72,80	60
16	Bonatua Lunasi	Lumban Lobu	57,74	24

Sumber : Kabupaten Toba Samosir dalam Angka 2016

Balige adalah ibukota Kecamatan Toba Samosir dengan luas wilayah 91,05 km².

Kecamatan Nassau merupakan kecamatan paling jauh dengan luas wilayah terluas kedua setelah Kecamatan Habinsaran. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu. Kecamatan Siantar Narumonda merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Porsea pada tahun 2008.

4.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Toba Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 900 - 2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal. Struktur tanahnya labil dan

berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kabupaten Toba Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Toba Samosir mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba. Untuk tahun 2015 pengamatan curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Toba Samosir dilakukan di tiga titik pengamatan yaitu di Kecamatan Balige, Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Sigumpar dengan hasil pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rata – Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Toba Samosir

	Kecamatan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
01	Januari	142	24
02	Februari	14	6
03	Maret	16	8
04	April	125	15
05	Mei	116	24
06	Juni	70	16
07	Juli	14	7
08	Agustus	188	19
09	September	105	11
10	Oktober	38	7
11	Nopember	196	22
12	Desember	45	7

Sumber : Kabupaten Toba Samosir dalam Angka 2016

Kondisi kelerengan atau topografi wilayah Kabupaten Toba Samosir sangat variatif, yaitu datar (0-8%), berombak (8-15%), bergelombang (15-25%), curam (25-40%), dan terjal/ bergunung (>40%) untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Kondisi Kelerengan Lahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015

Kecamatan	Luas Lereng (Ha)				
	Datar (D)	Berombak (BK)	Bergelombang (BG)	Curam (C)	Terjal (T)
	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
2	3	4	5	6	7
Balige	6,125.95	2,494.74			-
Tampahan	2,287.69			472.85	-
Laguboti	5,660.21	694.65			-
Habinsaran	13,720.30	11,565.55	5,939.97	285.26	-
Borbor	368.00	15,201.63	18,577.11	3,907.23	-
Nassau	2,211.80	14,203.99	12,738.67	648.82	-
Silaen	6,084.53	459.12			-
Sigumpar	2,237.44				-
Porsea	6,614.47			512.47	-
Pintu P. Meranti	17,199.40	6,873.08	2,259.92	12,160.07	-
Siantar Narumonda	3,460.68			20.06	-
Lumban Julu	7,452.46			11,795.64	-
Uluan	5,252.68			1,036.66	-
Ajibata	2,252.07			4,826.82	-
Jumlah	80,927.69	51,492.76	39,515.67	35,665.90	-

Sumber : Toba Samosir Dalam Angka 2016

Kabupaten Toba Samosir berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 900-2.200 m dpl, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba.

Jika dilihat dari kondisi fisiknya bahwa daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah yang datar. Hal itu merupakan salah satu faktor pendukung sebagai pusat pertumbuhan yang bisa dijangkau dan cepat berkembang.

4.1.3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 adalah sebesar 179.704 jiwa, dengan jumlah rumah tangga (RT) adalah 43.845 RT dan luas wilayah daratan adalah 2.021,8 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 adalah sebesar 88,97 jiwa/km². Dilihat dari persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi yaitu 38.088 jiwa dengan tingkat kepadatan 418,32 jiwa/km². Persebaran penduduk dengan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan Tampahan dengan jumlah penduduk 4.458 jiwa, dengan kepadatan penduduk 182,33 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu kecamatan Nassau dengan tingkat kepadatan 22,28 jiwa/km², dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk		
	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan	Persen
2011	174.748	-	-
2012	174.865	117	0.07
2013	175.069	204	0.12
2014	178.568	3.499	1.99
2015	179.704	1.136	0.63
	Jumlah	4.956	2.81

Sumber : BPS Toba Samosir (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk dari tahun 2011-2015 adalah 1.239 jiwa per tahunnya dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 0,7025 %. Dari analisa tersebut dapat diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2017 adalah berkisar 182.238 jiwa.

4.2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Toba Samosir saat ini

Sebagai gambaran tentang kondisi makro ekonomi Kabupaten Toba Samosir tahun 2011-2015, yang dapat mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Toba Samosir tahun 2011-2015 berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010 dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Lampiran 2.

Dapat dilihat adanya indikasi ketidakstabilan produktivitas dari seluruh jenis lapangan usaha sektor ekonomi yang membentuk produksi PDRB Kabupaten Toba Samosir dari tahun 2011-2015 dalam menghasilkan barang dan jasa yang dapat ditimbang dengan nilai uang. Nilai tambah setiap jenis lapangan usaha ekonomi yang membentuk PDRB tersebut, yang memiliki nilai yang terbesar diindikasikan didominasi dari sektor lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan eceran dan besar, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Dari tabel di atas terlihat bahwa peningkatan nilai PDRB dari setiap produktivitas jenis lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Toba Samosir juga dapat menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011-2014. Sementara untuk tahun 2015 kembali mengalami peningkatan.

4.3. Kondisi Kabupaten Toba Samosir di Propinsi Sumatera Utara

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata- rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata- rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal daerah- daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat dibagi dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Dengan membandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota atas dasar harga konstan 2010 (persen) Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dengan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 maka didapat hasil klasifikasi daerah pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Klasifikasi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara Menurut Typologi Klassen, 2011-2015

PDRB Perkapita (y)		
Laju Pertumbuhan PDRB (r)	$Y1 > y$	$Y1 < y$
$R1 > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh 1. Pematang Siantar 2. Medan	Daerah Berkembang Cepat : 1. Nias 2. Mandailing Natal 3. Tapanuli Selatan 4. Deli Serdang 5. Pakpak Barat

		6. Samosir 7. Padang Lawas Utara 8. Padang Lawas 9. Nias Utara 10. Binjai 11. Gunung Sitoli
$R1 < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan 1. Labuhan Batu 2. Batu Bara 3. Labuhan Batu Selatan 4. Labuhan Batu Utara 5. Sibolga	Daerah Relatif Tertinggal 1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Toba Samosir 4. Asahan 5. Simalungun 6. Dairi 7. Karo 8. Langkat 9. Nias Selatan 10. Humbang Hasundutan 11. Serdang Begadai 12. Nias Barat 13. Tajung Balai 14. Tebing Tinggi 15. Padang Sidempuan

Apabila dideskripsikan dalam bentuk kuadran maka klasifikasi Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi yaitu Medan dan Siantar.
2. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi yaitu Labuhan Batu, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara dan Sibolga.
3. Kuadran III yaitu sektor sedang tumbuh (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata propinsi yaitu Nias, Mandailing Natal,

Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Binjai dan Gunung Sitoli

4. Kuadran IV yaitu sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata propinsi yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Langkat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Serdang Begadai, Nias Barat, Tanjung Balai, Tebing Tinggi dan Padang Sidempuan. Kabupaten/ Kota Pematang Siantar dan Medan termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. 5 daerah masuk dalam klasifikasi daerah yang maju tapi tertekan, 11 daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, 15 daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal karena memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten.

Pada tahun 2011 Kabupaten Toba Samosir masih termasuk pada kategori daerah maju tetapi tertekan karena PDRB per kapita daerah yang lebih besar dari PDRB Propinsi Sumatera Utara. Namun mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan menjadi daerah yang relatif tertinggal karena penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Jika dilihat dari besaran PDRB, Kabupaten Toba Samosir terus mengalami peningkatan mulai tahun 2011-2015 namun jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir masih jauh tertinggal. Hal ini karena sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan kurang digalakkan. Dari

hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pertanian dan Bappeda Toba Samosir hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

- a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi,
- b. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil,
- c. Pengelolaan lahan belum optimal,
- d. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian/ peternakan masih rendah,
- e. Pengelolaan manajemen agribisnis dan peternakan belum optimal,
- f. Kapasitas kelembagaan/ kelompok pertanian belum optimal,
- g. Tata guna dan tata kelola air belum optima.

Begitu juga dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang berkembang di Kabupaten Toba Samosir. Danau Toba sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Namun selain Danau Toba masih terdapat potensi-potensi pariwisata lain, baik potensi alam, nilai-nilai budaya, dan benda-benda/ tempat bersejarah. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Pengelolaan dan penggalan potensi – potensi wisata belum optimal,
- b. Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

4.4 Analisis komoditas atau sektor unggulan di Kabupaten Toba Samosir

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Kabupaten Toba Samosir terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Indeks LQ Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,38	1,39	1,40	1,40	1,39	1,40
Pertambangan dan penggalan	0,31	0,29	0,24	0,23	0,22	0,26
Industri Pengolahan	0,64	0,62	0,61	0,58	0,57	0,60
Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	0,54	0,59	0,62	0,66	0,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	0,54	0,60	0,54	0,52	0,55
Konstruksi	0,93	0,95	0,96	0,98	1,00	0,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,88	0,89	0,88	0,88
Transportasi dan Pergudangan	0,61	0,60	0,61	0,62	0,63	0,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38	1,36	1,34	1,34	1,32	1,35
Informasi dan Komunikasi	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	0,49	0,49	0,52	0,53	0,51
Real Estat	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68
Jasa Perusahaan	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,85	2,90	2,94	2,95	2,94	2,91
Jasa Pendidikan	1,26	1,30	1,31	1,32	1,35	1,31

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,88	0,88	0,86	0,86	0,88
Jasa Lainnya	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31

Sumber : BPS Toba Samosir 2011-2016 (diolah)

Selama periode 2011-2015 PDRB per kapita atas harga konstan Kabupaten Toba Samosir mengalami peningkatan. Tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Toba Samosir sekitar 3.792.702,18 (juta) rupiah atau setara dengan 651.115 rupiah per orang per bulan. Nilai tersebut semakin meningkat pada tahun 2012 menjadi 3.985.032,53 (juta) rupiah atau setara dengan 683.675 rupiah per orang per bulan. Meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 4.178.496,09 (juta) rupiah setara dengan 716.031 rupiah per orang per bulan. Pada tahun 2014 mencapai angka 4.355.070,20 (juta) rupiah yang setara dengan 731.666 rupiah per orang per bulan hingga pada tahun 2015 PDRB per kapita Kabupaten Toba Samosir mencapai angka 4.553.171,40 (juta) rupiah dengan pendapatan per orang per bulannya setara dengan 760.112 rupiah.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor tersebut di daerah dimaksud lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Dari tabel LQ PDRB Kabupaten Toba Samosir dari tahun 2011-2015 dapat diketahui beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Toba Samosir yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,40 ; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,35 ; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,91 dan Sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,31.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial memiliki nilai LQ rata-rata terbesar di Kabupaten Toba Samosir yaitu sebesar 2,91. Kegiatan pada sektor ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan yang berarti bahwa setiap kegiatan perekonomian dan lapangan usaha di Kabupaten Toba Samosir lebih mengandalkan peranan pemerintah dalam pengembangannya.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar yang mempunyai andil dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Toba Samosir dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,40 dan merupakan sektor yang masih tetap diunggulkan saat ini di Kabupaten Toba Samosir dengan beberapa komoditi yang dapat dikembangkan seperti padi, jagung, sayur- sayuran, kopi dan lain- lain.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk peningkatan PDRB Kabupaten Toba Samosir yakni sebesar 1,35. Hal ini dikarenakan karena makin dikembangkannya kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba pada umumnya dan munculnya objek- objek wisata baru di Kabupaten Toba Samosir pada khususnya yang mampu menarik para investor dalam mengembangkan usahanya di Kabupaten Toba Samosir.

Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor yang berperan dalam peningkatan PDRB Kabupaten Toba Samosir dengan nilai LQ sebesar 1,31.

4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Toba Samosir saat ini

4.5.1 Sarana Niaga

Sarana niaga dalam hal ini pasar merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan dalam faktor banyaknya fasilitas yang dimiliki sebuah daerah sebagai pusat pertumbuhan. Kabupaten Toba Samosir memiliki 13 pasar yang bersifat tidak permanen (buka pada hari tertentu) yang lebih sering disebut pekan. Pekan di Kabupaten Toba Samosir hanya buka seminggu sekali atau lebih sering tetapi tidak setiap hari. Penyebaran pekan yang ada di Kecamatan Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Nama Pekan, Lokasi dan Hari Pekan menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015

	Nama Pekan	Lokasi	Hari Pekan
01	Balige	Jl. SM. Raja Balige	Jumat
02	Tampahan	-	-
03	Laguboti	Jl. SM. Raja Laguboti	Senin
04	Habinsaran	Parsoburan	Selasa
05	Borbor	Borbor	Sabtu
06	Nassau	Nassau	Jumat
07	Silaen	Silaen	Kamis
08	Sigumpar	-	-
09	Porsea	Jl. SM. Raja Porsea	Rabu
10	Pintu Pohan Meranti	Pintu Pohan Meranti	Kamis
11	Siantar Narumonda	-	-
12	Parmaksian	Pangombusan	Sabtu
13	Lumban Julu	Lumban Julu	Jumat
14	Uluan	Uluan	Sabtu
15	Ajibata	Ajibata	Sabtu
16	Bonatua Lunasi	Bonatua Lunasi	Sabtu

Sumber : Kabupaten Toba Samosir dalam Angka 2016

4.5.2 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan salah satunya adalah ketersediaan gedung sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	Sumber : Toba Samosir dalam Angka, 2011-2015
1	PAUD	201	214	158	185	168	
2	SD	222	226	227	224	224	
3	SMP	45	45	49	48	48	
4	SMA	15	16	17	16	16	
5	SMK	19	19	21	22	22	
6	Akademi	6	6	6	7	7	

Samosir dalam Angka, 2011-2015

Pada tahun 2011 jumlah gedung sekolah PAUD berjumlah 201 unit hingga pada tahun 2015 berkurang menjadi 168 unit, jumlah gedung SD berjumlah 222 unit mengalami penambahan menjadi 224 unit, begitu juga dengan jumlah gedung SMP dari 45 unit menjadi 48 unit, untuk tingkat SMA dan SMK jumlah gedung sekolah mengalami penambahan dari 34 unit menjadi 38 unit, jumlah sekolah akademi adalah berjumlah 7 unit sampai tahun 2015.

4.5.3 Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Puskesmas	19	19	19	19	19
3	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	31	31	31	31	31
4	BPU/ Rumah Bersalin Swasta	11	14	16	15	15
5	Poskesdes	157	179	188	186	186
6	Polindes	77	77	73	77	77
7	Posyandu	309	303	307	309	275
8	Apotek	10	11	11	12	12

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
9	Toko Obat	17	20	25	26	26

Sumber: BPS Toba Samosir

Pembangunan bidang kesehatan antara bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, posyandu, polindes, pusling roda dua dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan periode 2011 sampai dengan 2015.

4.6 Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kabupaten Toba Samosir

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Toba Samosir dikaji berdasarkan atas Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum sebagai acuan Pemerintah Propinsi dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi daerah atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

4.6.1 Sarana Niaga

Sesuai dengan standar pelayanan minimal jumlah sarana niaga dalam hal ini pasar minimal tersedia 1 unit untuk 30.000 penduduk. Untuk tahun 2015 jumlah pasar yang tersedia di Kabupaten Toba Samosir berjumlah 13 pasar yang tersebar di 13 kecamatan Kabupaten Toba Samosir seperti pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10 Jumlah Pekan/ Pasar di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015

Kecamatan		Lokasi
01	Balige	Jl. SM. Raja Balige
02	Tampahan	-
03	Laguboti	Jl .SM. Raja Laguboti
04	Habinsaran	Parsoburan
05	Borbor	Borbor
06	Nassau	Nassau
07	Silaen	Silaen
08	Sigumpar	-
09	Porsea	Jl. SM. Raja Porsea
10	Pintu Pohan Meranti	Pintu Pohan Meranti
11	Siantar Narumonda	-
12	Parmaksian	Pangombusan
13	Lumban Julu	Lumban Julu
14	Uluan	Uluan
15	Ajibata	Ajibata
16	Bonatua Lunasi	Bonatua Lunasi

Sumber : Kabupaten Toba Samosir dalam Angka 2016

Menurut tabel tersebut di atas jumlah pasar/ pekan yang dimiliki Kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2015 sudah melebihi standar minimal yang ditetapkan. Untuk tahun 2017 sesuai dengan proyeksi penduduk jumlah pasar/ pekan tidak mengalami perubahan jumlah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pasar di Kabupaten Toba Samosir sudah mencukupi.

4.6.2 Sarana Pendidikan

Kualitas kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Penyediaan sarana gedung sekolah merupakan salah satu cara untuk menunjang terselenggaranya kualitas pendidikan. Sesuai dengan acuan standar pelayanan minimal yang dipakai bahwa 1 unit TK untuk setiap 1.000 penduduk ,1 unit SD untuk setiap 6.000 penduduk, 1 unit SLTP untuk setiap 25.000 penduduk , 1 unit

SLTA untuk setiap 30.000 penduduk dan 1 unit Perguruan Tinggi untuk setiap 70.000 penduduk.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2015 Kabupaten Toba Samosir masih kekurangan 12 unit gedung sekolah TK/ PAUD dari jumlah yang tersedia sebanyak 168 unit, sementara standar jumlah fasilitas yang harus dimiliki berjumlah 180 unit. Untuk tingkat SD jumlah gedung yang tersedia sebanyak 224 gedung, merupakan jumlah yang cukup besar dari jumlah standar yang ditetapkan sebanyak 30 gedung. Begitu juga dengan gedung sekolah SMP, jumlah sarana yang sudah dimiliki Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 berjumlah 48 unit gedung SMP , merupakan jumlah yang sudah melebihi dari jumlah minimal yang ditetapkan yakni sebanyak 7 unit. Hal ini hampir sama dengan kondisi sarana gedung untuk tingkat SMA dan SMK, dimana pada tahun 2015 jumlah sarana gedung SMA dan SMK yang dimiliki Kabupaten Toba Samosir berjumlah 38 unit sedangkan jumlah minimal yang ditetapkan hanyalah berjumlah 6 unit. Untuk tingkat akademi sesuai dengan standar pelayanan minimal, jumlah gedung akademi yang harus dimiliki Kabupaten Toba Samosir berjumlah 3 gedung meskipun pada kenyataannya pada tahun 2015 jumlah gedung akademi di Kabupaten Toba Samosir sudah berjumlah 7 gedung akademi.

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11 Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sarana (unit)		Keterangan		S um ber : Tob a
		2015	SPM	Kurang	Lebih	
1	PAUD	168	180	12	-	
2	SD	224	30	-	94	
3	SMP	48	7	-	41	
4	SMA	16	3	-	13	
5	SMK	22	3	-	19	
6	Akademi	7	3	-	4	

Samosir dalam Angka, 2011-2015 (diolah)

Dari hasil proyeksi penduduk sampai tahun 2017 Kabupaten Toba Samosir membutuhkan sarana pendidikan sebanyak 182 unit gedung TK/ PAUD, 30 unit gedung SD, 7 unit gedung SMP, 6 unit gedung SMA/SMK dan 3 unit gedung akademi. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Toba Samosir sudah mencukupi terkecuali pada tingkat TK/ PAUD masih kekurangan fasilitas sejumlah 14 unit. Dari hasil wawancara penulis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir bahwa akan selalu dilakukan penambahan jumlah sarana pendidikan di tingkat TK/ PAUD di tahun berikutnya sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba Samosir semakin meningkat. Proyeksi penambahan fasilitas pendidikan di Kabupaten Toba Samosir dapat disajikan pada Tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12 Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sarana (unit)		Keterangan	
		2017	SPM	Kurang	Lebih
1	PAUD	168	182	14	-
2	SD	224	30	-	94
3	SMP	48	7	-	41
4	SMA	16	3	-	13
5	SMK	22	3	-	19
6	Akademi	7	3	-	4

Sumber : Toba Samosir dalam Angka, 2011-2015 (diolah)

4.6.3 Sarana Kesehatan

Dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir diketahui bahwa untuk tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 50 unit, rumah bersalin sebanyak 15 unit dan balai pengobatan berjumlah 578 unit. Dalam hal ini Poskesdes, Polindes dan Posyandu dikategorikan sebagai balai pengobatan. Sesuai dengan data tahun 2011-2015 dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2015 sarana kesehatan di Kabupaten Toba Samosir sudah memadai dengan uraian untuk rumah sakit umum, Kabupaten Toba Samosir sudah memiliki 1 unit rumah sakit umum milik pemerintah dan 1 unit rumah sakit umum milik swasta. Hal ini berarti bahwa rumah sakit umum di Kabupaten Toba Samosir sudah mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kondisi sarana kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13 Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015

No	Jenis fasilitas	Jumlah Sarana (unit)		Keterangan		Sumber : Toba Samosir dalam Angka,
		2015	SPM	Kurang	Lebih	
1	Rumah Sakit Umum	2	1	-	1	
2	Puskesmas	50	2	-	48	
3	Rumah Bersalin	15	6	-	11	
4	Balai Pengobatan	578	60	-	518	

2011-2015 (diolah)

Proyeksi tahun 2017 tidak mengalami perubahan penambahan fasilitas. Untuk fasilitas puskesmas, rumah bersalin dan balai pengobatan sampai tahun 2017 Kabupaten Toba Samosir juga sudah mempunyai lebih dari cukup fasilitas dari jumlah fasilitas yang ada Kabupaten Toba Samosir sudah memenuhi standar pedoman pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Kondisi sarana kesehatan untuk tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14 Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017

No	Jenis fasilitas	Jumlah Sarana (unit)		Keterangan		Sumber : Toba Samosir dalam Angka,
		2017	SPM	Kurang	Lebih	
1	Rumah Sakit Umum	2	1	-	1	
2	Puskesmas	50	2	-	48	
3	Rumah Bersalin	15	6	-	11	
4	Balai Pengobatan	578	61	-	517	

2011-2015 (diolah)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan beberapa metode analisis tentang kajian Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Toba Samosir merupakan wilayah dataran tinggi beriklim tropis dengan topografi tanah yang beraneka ragam yaitu datar, landai, miring dan terjal.
- b. Jika dilihat dari tingkat Propinsi Sumatera Utara, sampai pada tahun 2015 Kabupaten Toba Samosir masih berada pada kuadran ke empat yakni daerah yang tertinggal karena merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata propinsi.
- c. Kabupaten Toba Samosir memiliki sektor unggulan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,40 ; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,35 ; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 2,91 dan Sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,31.
- d. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu daerah di Kawasan Danau Toba yang memiliki jumlah penduduk sampai pada tahun 2015 berjumlah 179.704 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,7025% setiap tahunnya sehingga dapat diprediksi jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 berkisar 182.238 jiwa.

- e. Dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2017 Kabupaten Toba Samosir sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang sudah ditentukan. Sampai pada tahun 2015 Kabupaten Toba Samosir masih kekurangan 12 unit gedung sekolah TK/ PAUD. Untuk sarana pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK serta akademi sudah memadai.
- f. Untuk penyediaan sarana kesehatan dan niaga di Kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2017 sudah memadai dan cukup namun masih diperlukan peningkatan kualitas kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Toba Samosir.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang didapat secara umum Kabupaten Toba Samosir sudah memiliki kemampuan dalam mengembangkan daerahnya sendiri namun jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain masih jauh tertinggal sehingga terdapat beberapa saran sebagai masukan untuk pengembangan Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara :

- a. Masih diperlukannya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penataan kota dan lingkungan yang ada di Kabupaten Toba sehingga Kabupaten Toba Samosir lebih mampu meningkatkan daya tarik seperti mendekorasi bangunan- bangunan yang ada dengan motif gorga atau ulos.
- b. Tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Toba Samosir yang masih tertinggal diharapkan pemerintah daerah lebih menggalakkan sektor- sektor unggulan yang ada dengan cara meningkatkan daya guna setiap produk atau barang/ jasa yang dihasilkan untuk selanjutnya dapat diekspor ke daerah lain.

Seperti mengkreasikan kain ulos menjadi baju dan hiasan, meningkatkan kreasi komoditi unggulan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- c. Pemerintah Daerah diharapkan menjadikan sektor unggulan yang ada sebagai program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya.
- d. Selain ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan niaga yang sudah memadai masih diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada di Kabupaten Toba Samosir sehingga kualitas pembangunan bisa lebih meningkat.
- e. Perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya untuk lebih menggalakkan sektor akomodasi dan makan minum terkait dengan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata dengan penambahan sarana dan prasarana akomodasi berupa hotel dan restoran di Kabupaten Toba Samosir.
- f. Kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu daerah di kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata diperlukan pengelolaan dan penggalan yang lebih optimal akan potensi- potensi wisata yang ada serta keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata.
- g. Kepada peneliti yang ingin meneliti lebih jauh tentang kajian Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara supaya mengkaji lebih jauh tentang sarana prasarana lain yang mendukung Kabupaten Toba Samosir sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Arsyad, Lincolin, 1996. *Analisis Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Modul Program Penataan Manajemen Sektor Ekonomi Strategis*, Kerjasama Direktorat Jenderal PUOD-Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2016. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.
-----, 2015. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.
-----, 2014. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.
-----, 2013. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.
-----, 2012. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.
-----, 2011. *Propinsi Sumatera Utara Dalam Angka*.

Badan Pusat Statistik Toba Samosir, 2016. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.
-----, 2015. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.
-----, 2014. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.
-----, 2013. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.
-----, 2012. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.
-----, 2011. *Kabupaten Toba Samosir Dalam Angka*.

Badrudin, Rudy, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, 2016, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016*

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara, 2016, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2016*

Boediono, 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.

Setiono, Dedi, 2010. *Ekonomi Pengembangan Wilayah. Teori dan Analisis*. Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Helmi, Syafrizal dan Muslich Lufti, 20015, *Analisis Data*, Medan : USU Press
- Larengkum, Dirgahayu, Vecky Masinambow dan Krest Tolosang. 2012. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nazir, Moh, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Gramedia
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
- Sirojuzilam, 2015. *Pembangunan Ekonomi Regional*, Medan : USU Press
- , 2011. *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan : Usu Press
- , 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Siegel,Sidney, 2011, *Statistik Nonparametik untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : PT. Gramedia
- Sjafrizal, 2012, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sukirno Sadono, 2006. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3, Medan : PT. Raja Grafindo Persada
- Suparmoko, M, 1993. *Kaitan antara Sektor Pertanian dan Bukan Pertanian, Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Pembangunan Pertanian*, Jakarta : PERHEPI
- Todaro, Michael, P, 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam Jilid 1, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Tarigan, Robinson, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* , Medan : Bumi Aksara
- Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional* , Medan : Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wikarya, Uka, 2015, *Analisis Model Input Output*, Jakarta : LPEM FE UI

Lampiran 1. Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah) dalam persen

	Sektor	Proporsi Terhadap PDRB				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,48	35,39	35,11	34,72	34,81
2	Pertambangan dan penggalian	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29
3	Industri Pengolahan	13,10	12,71	12,38	11,44	11,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
6	Konstruksi	11,08	11,34	11,62	12,07	12,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,97	15,21	15,38	15,78	15,53
8	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,71	2,76	2,82	2,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,94	2,90	2,90	2,94	2,96
10	Informasi dan Komunikasi	1,14	1,17	1,20	1,24	1,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,51	1,56	1,64	1,69
12	Real Estat	2,68	2,70	2,72	2,77	2,79
13	Jasa Perusahaan	0,80	0,80	0,81	0,81	0,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,84	9,65	9,55	9,72	9,75
15	Jasa Pendidikan	2,51	2,55	2,62	2,67	2,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,75	0,78	0,79	0,80
17	Jasa Lainnya	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Toba Samosir (diolah)

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011-2015 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 dalam persen

Sektor	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,82	4,01	2,99	4,81	4,16
Pertambangan dan penggalian	3,02	2,88	1,83	2,13	2,46
Industri Pengolahan	1,99	2,11	-3,87	1,01	0,31
Pengadaan Listrik dan Gas	7,53	4,61	7,09	4,87	6,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,10	5,79	5,56	-8,43	2,26
Konstruksi	7,50	7,40	7,68	6,99	7,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,75	6,02	6,49	2,88	5,54
Transportasi dan Pergudangan	6,59	7,09	5,87	6,96	6,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,60	4,84	5,16	5,36	4,74
Informasi dan Komunikasi	8,21	7,87	6,82	7,22	7,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,35	8,58	8,39	7,98	8,57
Real Estat	5,91	5,56	5,94	5,02	5,61
Jasa Perusahaan	5,24	5,21	4,69	5,09	5,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,03	3,75	5,71	4,90	4,35
Jasa Pendidikan	6,78	7,93	5,87	6,50	6,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,76	8,06	5,87	5,27	6,74
Jasa Lainnya	4,51	5,04	5,54	5,55	5,16

Sumber: BPS Toba Samosir (diolah)

